

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten Tahun 2020-2023

Indri Dwi Lestari

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: indri.21017@mhs.unesa.ac.id

Nur Ayu Sulistyaningsih

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: nurayu.21035@mhs.unesa.ac.id

Trisha Clarita Sibatuara

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: trishaclarita.21067@mhs.unesa.ac.id

Aprillia Nilasari

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: aprillianilasari@unesa.ac.id

Kukuh Arisetyawan

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: kukuharisetyawan@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian mengenai pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Data yang digunakan pada penelitian ini yakni data panel yang mencakup data cross section dan time series tahun 2020-2023. Menggunakan model FEM, hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan jumlah Penduduk tidak signifikan, sedangkan Upah Minimum memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran di Banten. Secara simultan, ketiga variabel ini signifikan dalam mempengaruhi pengangguran di Provinsi Banten..

Kata Kunci : *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka*

Abstract

This study investigates the impact of Labor Force Participation Rate, Minimum Wage, and Population Size on the Open Unemployment Rate across Districts/Cities in Banten Province. The research employs panel data, incorporating both cross-sectional and time series data from 2020-2023. Through the application of Fixed Effect Model (FEM), the findings reveal that Labor Force Participation Rate and Population Size demonstrate no significant effect, whereas Minimum Wage exhibits a significant influence on the Unemployment Rate in Banten. The simultaneous test indicates that these three variables collectively have a significant impact on unemployment levels in Banten Province..

Keywords : *Labor Force Participation Rate, District/City Minimum Wage, Population Size, Open Unemployment Rate*

PENDAHULUAN

Pengangguran menjadi salah satu tantangan makroekonomi yang paling krusial karena dampaknya yang langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebagai permasalahan global, pengangguran telah menjadi fokus utama bagi setiap negara dalam upaya pembangunan ekonominya (Kurnia, 2021). Para pembuat kebijakan dan politisi senantiasa menjadikan isu pengangguran sebagai prioritas dalam agenda mereka, dengan berbagai program yang ditawarkan untuk menciptakan lapangan kerja baru (Wahab et al., 2022). Urgensi penanganan masalah pengangguran semakin meningkat mengingat dampak lanjutannya yang dapat memicu berbagai permasalahan sosial, terutama peningkatan angka kemiskinan dan ketimpangan dalam masyarakat (Lamatenggo et al., 2019).

Dalam konteks nasional, pengangguran merupakan kendala utama dalam pembangunan ekonomi, dengan Provinsi Banten menghadapi tantangan khusus dalam hal ini. Permasalahan ini berakar pada ketimpangan antara ketersediaan lapangan kerja dan jumlah pencari kerja. Mengacu pada teori *Job Search* yang dikembangkan oleh McCall (1970), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki hubungan kompleks dengan pengangguran, dimana pencari kerja akan terus mencari pekerjaan hingga menemukan upah yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Teori ini menjelaskan mengapa TPAK yang tinggi tidak selalu menghasilkan tingkat pengangguran yang rendah. Di Provinsi Banten sendiri, analisis historis menunjukkan bahwa TPAK mengalami dinamika yang fluktuatif, dengan capaian tertinggi sebesar 69,97% tercatat di Kabupaten Lebak pada tahun 2020 selama periode 2020-2023.



Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi 2023

Sumber: BPS

Selain TPAK, dinamika pengangguran juga dipengaruhi secara signifikan oleh kebijakan pengupahan yang diterapkan di suatu wilayah. Dalam konteks ini, teori Dual Labor Market yang dikemukakan oleh Doeringer dan Piore (1971) menjelaskan bahwa pasar tenaga kerja terbagi menjadi sektor primer dan sekunder, dimana penetapan upah minimum dapat mempengaruhi tingkat pengangguran secara berbeda di kedua sektor tersebut. Di sektor primer dengan keterampilan tinggi, kenaikan upah

minimum cenderung mendorong peningkatan produktivitas, sementara di sektor sekunder dapat menyebabkan pengurangan tenaga kerja. Hal ini terlihat di Kota Cilegon yang konsisten mencatatkan upah minimum tertinggi di Provinsi Banten, dari Rp4.246.081 pada tahun 2020 hingga mencapai Rp4.657.223 pada tahun 2023, mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja yang kompleks di wilayah ini.

Sementara kebijakan upah minimum mempengaruhi sisi permintaan tenaga kerja, dari sisi penawaran, jumlah penduduk memberikan dampak signifikan terhadap pengangguran. Teori Pertumbuhan Endogen yang dikembangkan oleh Romer (1994) menyoroti bahwa pertumbuhan populasi dapat berkontribusi positif terhadap pengurangan pengangguran jika disertai dengan peningkatan kualitas modal manusia dan inovasi teknologi. Namun, tanpa kedua faktor tersebut, pertumbuhan populasi justru dapat meningkatkan pengangguran. Data demografis Provinsi Banten menunjukkan tren pertumbuhan populasi yang konsisten dalam empat tahun terakhir, dengan Kabupaten Tangerang sebagai wilayah terpadat yang mencapai 3.362.61 jiwa, menggarisbawahi pentingnya pengelolaan aspek kependudukan dalam mengatasi pengangguran.

Kompleksitas permasalahan pengangguran di Provinsi Banten dapat dipahami melalui teori Keseimbangan Umum yang dikembangkan oleh Walras, yang menekankan interaksi simultan antara berbagai variabel ekonomi, dimana ketiga variabel tersebut membentuk suatu sistem yang saling terkait dalam mempengaruhi tingkat pengangguran. TPAK mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja, upah minimum mempengaruhi permintaan tenaga kerja, sementara jumlah penduduk mempengaruhi keseimbangan pasar tenaga kerja secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Jumlah Penduduk mempengaruhi dinamika Tingkat Pengangguran Terbuka di wilayah ini, dengan berpijak pada kerangka teoritis yang menghubungkan ketiga variabel tersebut dengan pengangguran.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menerapkan analisis kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. Dalam kerangka analisisnya, penelitian mengklasifikasikan variabel ke dalam dua kelompok utama. Kelompok pertama adalah variabel dependen yang fokus pada tingkat pengangguran terbuka di wilayah Banten, diukur secara persentase melalui rasio antara jumlah pengangguran dan total angkatan kerja dalam periode yang sama. Kelompok kedua terdiri dari tiga variabel independen: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X1), Upah Minimum Kabupaten/Kota (X2), dan Jumlah Penduduk (X3).

Analisis penelitian ini menggunakan struktur data panel yang mengintegrasikan dimensi waktu (time series) dan dimensi wilayah (cross section). waktu penelitian yang dipilih adalah pada tahun 2020 sampai 2023, sedangkan dimensi spasialnya meliputi berbagai wilayah administratif di Provinsi Banten selama periode tersebut. Pendekatan data panel ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan variasi baik antar waktu maupun antar wilayah.

Penelitian ini menerapkan metode analisis regresi data panel, yang menggabungkan data time series periode 2020-2023 dengan data cross section dari 8 wilayah di Banten. Dalam analisis regresi data panel, tersedia tiga model yang dapat digunakan: common effect model (CEM), fixed effect model (FEM), dan random effect model (REM). Pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji spesifikasi model yang terdiri dari uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier. Setelah model terpilih ditetapkan, dilanjutkan dengan serangkaian pengujian meliputi uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi (Widiantari et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uji data Panel dengan Eviews, telah didapatkan model terbaik pada penelitian ini yaitu model fixed effect sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil uji data panel

| Variabel | Coefficient | Prob |
|---------------------------|-------------|----------|
| C | 53.35618 | 4.8196 |
| X1 | -1.28162 | 0.2126 |
| X2 | -2947864 | 0.0006 |
| X3 | -0.208162 | 0.3932 |
| R-square | | 0.696845 |
| Adjusted R-squared | | 0.552485 |
| F-statistic | | 4.827143 |
| Prob(F-statistic) | | 0.001166 |

Persamaan dalam regresi data panel yang diperoleh adalah:

$$\text{Pengangguran} = 53.35618 - 1.28162 \text{ LnTPAK} - 2947864 \text{ LnUMK} - 0.208162 \text{ LnJP}$$

- Nilai Konstanta Tingkat Pengangguran bernilai positif yakni sebesar 53.35618, yang menyatakan apabila variabel TPAK, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk bernilai nol maka Tingkat Pengangguran sebesar 53.35618.
- Variabel TPAK memiliki hubungan negatif dengan Tingkat Pengangguran dimana koefisien sebesar -1.28162, hal tersebut menandakan bahwa variabel TPAK berpengaruh negative terhadap Tingkat Pengangguran, yang mana ketika TPAK mengalami perubahan 1% maka akan mempengaruhi tingkat pengangguran sebesar -1.28162.
- Variabel Upah Minimum memiliki hubungan negatif dengan tingkat pengangguran. Dimana nilai koefisien sebesar -2947864.

hal tersebut mengindikasikan bahwa ketika variabel upah minimum mengalami perubahan 1% maka akan mempengaruhi tingkat pengangguran sebesar -2947864.

- d. Variabel jumlah penduduk memiliki hubungan negatif dengan tingkat pengangguran dimana nilai koefisien sebesar -0.208162. hal tersebut menyatakan bahwa ketika tingkat pengangguran mengalami perubahan sebesar 1% maka tingkat pengangguran akan berubah sebesar -0.208162.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Analisis penelitian ini menunjukkan nilai probabilitas $0,151198 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas penelitian. Hasil uji multikolinieritas ini menunjukkan bahwa model ini tidak memiliki multikolinieritas, karena koefisien korelasi kurang dari 0.90. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah -0.110243, korelasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Jumlah Penduduk adalah 0.215107, dan korelasi Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Jumlah Penduduk adalah -0.003800.

3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas penelitian ini menunjukkan nilai probabilitas untuk masing-masing variabel bebas adalah 0,2623 di atas 0,05; nilai probabilitas untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota 0,2946 di atas 0,05; dan nilai probabilitas untuk Jumlah Penduduk 0,0987 di atas 0,05. Karena H_0 diterima, tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

1. Uji t (uji parsial)

Interpretasi hasil uji t dua arah dengan t-tabel 2.03951 di mana $df = 32 - 3 - 1 = 28$ ($df = n - k - 1$) untuk $\alpha = 0.05$ adalah:

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X_1)

Berdasarkan hasil uji t dengan menggunakan fixed effect model menyatakan bahwa variabel independen X_1 memiliki koefisien sebesar -1.208162 dengan nilai probabilitas (0.2126) > 0.05 yang berarti variabel X_1 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

b. Upah Minimum Kabupaten/Kota (X_2)

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan model fixed effect menyatakan bahwa variabel X_2 berpengaruh secara negatif signifikan terhadap variabel dependen. Dari hasil uji parsial nilai koefisien sebesar -

2947864 dan nilai probabilitas $0.0006 < 0.05$, sehingga dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima.

c. Jumlah Penduduk (X3)

Hasil penelitian model fixed effect menyatakan bahwa variabel X3 memiliki nilai koefisien -0.208162 dengan nilai probabilitas t (0.3932) yang mana nilai probabilitas t lebih kecil dari 0.05 . sehingga variabel X3 secara individu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen..

2. **Uji F (Simultan)**

Uji-F dilakukan untuk melihat pengaruh seluruh variabel X1, X2, dan X3 secara bersamaan terhadap variabel dependen. Nilai F-tabel berdasarkan $df_1 = 3$ dan $df_2 = 32 - 3 - 1 = 28$ dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ adalah 2.95 . Berdasarkan tabel, nilai Prob. (F-Statistic) adalah 0.001166 , di mana nilai ini lebih kecil dari $0,05$ ($0.001166 < 0,05$), atau nilai F hitung lebih besar dari F-tabel ($4.827143 > 2.95$).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen X1, X2, X3 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.

3. **Uji Koefisien Determinan R2 (R-Square)**

Nilai R-squared pada hasil uji diatas sebesar 0.552485 yang berarti kemampuan variabel X dalam mendeskripsikan variabel Y adalah sebesar $55,24\%$ dan sisanya $44,76\%$ dijelaskan oleh variabel yang tidak ada dalam penelitian ini.

Pembahasan

1. **Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Tingkat Pengangguran**

Dengan koefisien -1.208162 dan nilai probabilitas $0,2126$ yang lebih besar dari 0.05 , variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten, menurut hasil uji data panel yang dilakukan menggunakan model *fixed effect*. Hasil tidak signifikan antar variabel tersebut dapat dijelaskan melalui Teori Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja, yang pertama kali dikemukakan oleh Adam Smith (1776). Teori ini menyatakan bahwa hubungan antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bergantung pada keseimbangan antara penawaran tenaga kerja dan permintaan pasar kerja. Ketidakseimbangan terjadi ketika penawaran tenaga kerja meningkat, tetapi penciptaan lapangan kerja tidak memadai untuk menyerap tenaga kerja baru.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio yang menunjukkan proporsi angkatan kerja dalam kelompok penduduk usia kerja. Meskipun TPAK sering dianggap sebagai indikator positif dalam perekonomian, terdapat argumen bahwa peningkatan TPAK tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap

pengangguran. Hal tersebut terjadi karena ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penyediaan lapangan pekerjaan, di mana peningkatan jumlah tenaga kerja tidak diimbangi dengan penciptaan peluang kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar (Saukina Ila Salsabila et al., 2023).

2. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Tingkat Pengangguran

Penelitian mengenai pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum berdampak negatif signifikan terhadap pengangguran, dengan koefisien $-2,947,864$ dan nilai probabilitas $0,0006$, yang berarti hipotesis nol (H_0) ditolak. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan upah minimum dapat mengurangi permintaan tenaga kerja, terutama di kalangan pekerja tidak terampil, sesuai dengan fenomena *disemployment effect*. Teori Dual Labor Market oleh Doeringer dan Piore (1971) menjelaskan bahwa dampak upah minimum berbeda antara sektor primer dan sekunder; di sektor primer, kenaikan upah dapat meningkatkan produktivitas, sedangkan di sektor sekunder, yang sering kali melibatkan pekerjaan dengan keterampilan rendah, dapat menyebabkan pengurangan tenaga kerja.

Hasil penelitian ini mendukung teori tersebut, menunjukkan bahwa meskipun upah minimum bermanfaat bagi pekerja terampil, hal itu dapat meningkatkan pengangguran di sektor sekunder, sehingga kebijakan upah minimum perlu dipertimbangkan secara hati-hati untuk menghindari dampak negatif pada kelompok pekerja yang paling rentan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian dari (Wardani & Hasmarini, 2023) yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil estimasi data panel, dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel Upah Minimum bernilai negatif dan signifikan sebesar $1,38E-06$ yang artinya ketika terjadi kenaikan Upah sebanyak 1 (satu) satuan akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebanyak $1,38E-06$. Dengan kata lain jika diukur dari tingkat Upah yang diukur dari tingkat upah minimum provinsi maka akan mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka.

3. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran

Variabel tingkat pengangguran di Provinsi Banten secara parsial tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel jumlah penduduk, dengan nilai koefisien -0.208162 dan nilai probabilitas $t(0.3932)$ yang lebih kecil dari 0.05 . Ini adalah hasil dari penelitian yang melakukan uji data panel dengan model fixed effect. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhadi & Setyowati (2022) dimana dalam penelitian ini menyatakan bahwa Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap

tingkat pengangguran terbuka wilayah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat.

Ketidaksignifikanan hubungan antara jumlah penduduk dengan tingkat pengangguran di Provinsi Banten dapat dijelaskan menggunakan Teori Pertumbuhan Endogen dari Romer (1994). Sesuai dengan teori ini, pertumbuhan populasi di Banten tidak berdampak negatif terhadap pengangguran karena didukung oleh dua faktor utama yang disebutkan dalam teori tersebut: peningkatan kualitas modal manusia dan inovasi teknologi. Hal ini terlihat dari beberapa kondisi di Provinsi Banten: Pertama, komposisi demografis penduduk Banten yang didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun) telah menciptakan potensi bonus demografi, dimana banyak penduduk telah dibekali dengan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan. Kedua, perkembangan sektor UMKM di Banten yang pesat dan berbasis teknologi telah mampu menyerap tambahan tenaga kerja seiring dengan pertumbuhan penduduk. Ketiga, karakteristik Provinsi Banten sebagai daerah industri dan perdagangan yang berbatasan dengan DKI Jakarta mendorong adopsi teknologi dan inovasi dalam sektor produktif. Keempat, program-program pemberdayaan masyarakat dan pelatihan keterampilan yang dilakukan pemerintah daerah telah sejalan dengan prinsip peningkatan kualitas modal manusia yang ditekankan dalam teori Pertumbuhan Endogen.

4. **Pengaruh TPAK, UMK, dan Jumlah Penduduk Secara Simultan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka**

Berdasarkan hasil uji simultan diperoleh nilai probabilitas F-statistik sebesar $0.001166 < 0.05$ yang mengindikasikan bahwa variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Jumlah Penduduk secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kompleks antara ketiga variabel dalam mempengaruhi dinamika pengangguran. TPAK berkontribusi melalui ketersediaan tenaga kerja yang siap masuk ke pasar kerja, dimana perubahan pada tingkat partisipasi dapat mempengaruhi jumlah pencari kerja yang aktif. Upah Minimum memiliki peran penting dalam mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menyerap tenaga kerja, dimana perubahan tingkat upah dapat mempengaruhi biaya operasional perusahaan yang berdampak pada permintaan tenaga kerja. Sementara itu, dinamika Jumlah Penduduk berkontribusi pada perubahan struktur demografis yang dapat mempengaruhi keseimbangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Interaksi ketiga variabel ini secara bersamaan membentuk kondisi yang menentukan tingkat pengangguran di Provinsi Banten.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan di Provinsi Banten, dapat disimpulkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Ini menunjukkan bahwa fluktuasi TPAK tidak memberikan efek substansial pada angka pengangguran di provinsi ini. Di sisi lain, terdapat korelasi negatif yang signifikan antara Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan tingkat pengangguran, yang berarti bahwa peningkatan UMK berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran; kenaikan UMK cenderung menurunkan angka pengangguran. Selain itu, jumlah penduduk juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran, mengindikasikan bahwa perubahan populasi tidak memiliki dampak berarti pada fluktuasi tingkat pengangguran di wilayah ini. Ketika diuji secara bersamaan, ketiga variabel (TPAK, UMK, dan Jumlah Penduduk) menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran, mampu menjelaskan 55,24% dari variasi yang terjadi pada tingkat pengangguran, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini.

Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi pengaruh jumlah penduduk terhadap pengangguran, dengan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dengan mendorong investasi di sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja dan memperluas program pelatihan keterampilan. Meskipun TPAK tidak menunjukkan pengaruh signifikan, meningkatkan partisipasi angkatan kerja tetap penting melalui sosialisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Selain itu, kebijakan UMK harus ditetapkan secara seimbang; kenaikan UMK perlu disertai peningkatan produktivitas agar tidak mengurangi permintaan tenaga kerja. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tingkat pengangguran di Provinsi Banten dapat berkurang seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

REFERENSI

- Ariska, D. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Pengangguran di Sumatera Utara. <https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/54571/>
- Badan, P. S. (2020). Upah Minimum Kabupaten/Kota.
- Badan, P. S. (2021). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
- Badan, P. S. (2023). Jumlah Penduduk.
- Kurnia, A. (2021). Pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan). Hal 1 <https://scholar.google.com/scholar>

- Lamatenggo, O. F., Walewangko, E. N., & Layuck, I. A. (2019). Pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap pengangguran di Kota Manado. *Jurnal berkala ilmiah efisiensi*, 19(02), hal <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/25011/24716>
- Maulana, R., Rizki, C. Z., Nazamuddin, B. S., & ZT, A. F. (2023). PENGARUH TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI ACEH. 8(2), 78–87.
- Saukina Ila Salsabila, Suhaeda Nabila, Risma Ayu Rianti, Dhimas Priyoga, & Agus Eko Sujianto. (2023). Pengaruh Upah Minimum Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Jawa Timur Periode 2018-2022. *Journal of Administrative and Social Science*, 5(1), 92–107. <https://doi.org/10.55606/jass.v5i1.885>
- Suhadi, F. R., & Setyowati, E. (2022). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk , Pendidikan , Upah Minimum , Dan PDRB. *Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 879–888.
- Sutansyah Effendy, R. (2018). Fokus Ekonomi Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, Vol. 14, 105–124. <http://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe>
- Wahab, A., Qarina, Q., Syariati, A., & Aprinandhi, M. D. (2022). Konstruksi variabel makroekonomi terhadap inklusi keuangan di Indonesia (Doctoral dissertation, Lembaga Penelitian dan Pengabdiankepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo). Vol 4 hal 65 <https://doi.org/10.30603/ab.v18i1.2599>
- Widiantari, I. A. A., Sahri, S., & Suriadi, I. (2024). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Jumlah Penduduk, Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2021. *Jurnal Oportunitas : Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 58–64. <https://doi.org/10.29303/oportunitas.v3i1.607>
- Yuliansyah. (2020). Hubungan antara Pengangguran dan Upah Minimum di Indonesia. *Cross-Border*, 3(2), 338–345.
- Wardani, & Hasmarini. (2023). ANALISIS PENGARUH UPAH, IPM, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2018-2021. *PARETO : Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 89–96.